



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz UNTUK KEPERLUAN
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan Orbit Satelit, perencanaan penggunaan spektrum Frekuensi radio harus memperhatikan upaya mencegah terjadinya saling mengganggu, pemanfaatan spektrum Frekuensi radio yang efisien dan ekonomis, perkembangan teknologi, serta kebutuhan spektrum Frekuensi radio di masa depan;
 - b. bahwa pesatnya kebutuhan akan *mobile broadband* memerlukan pengaturan terhadap pita Frekuensi radio 1800 MHz yang memiliki ekosistem telekomunikasi yang matang, agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas melalui peningkatan layanan telekomunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan Rencana Pitalebar Indonesia untuk mencapai sasaran pembangunan Pitalebar Indonesia adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan spektrum Frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas melalui penataan ulang alokasi Frekuensi radio;
 - d. bahwa dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jaringan bergerak seluler perlu memperluas cakupan dan kapasitas jaringannya termasuk dengan menerapkan teknologi yang lebih efisien sepanjang mengikuti spesifikasi *3rd Generation Partnership Project (3GPP)* dan evolusinya;

- e. bahwa penggelaran jaringan dengan alokasi Frekuensi radio yang berdampingan (*contiguous*) dalam satu pita lebih efisien dibandingkan dengan penggelaran jaringan dengan lebar pita yang terfragmentasi (terpisahkan) dalam banyak pita sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pita Frekuensi radio 1800 MHz yang didasarkan pada prinsip kecepatan waktu dan efisiensi penggelaran jaringan telekomunikasi secara keseluruhan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penataan Pita Frekuensi radio 1800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi radio Indonesia;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi radio;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz UNTUK KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum Frekuensi radio adalah kumpulan pita Frekuensi radio.
3. Pita Frekuensi radio adalah bagian dari spektrum Frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
5. *Frequency Division Duplexing* yang selanjutnya disingkat FDD adalah jenis moda telekomunikasi melalui Frekuensi radio yang *uplink* dan *downlink*-nya berpasangan pada dimensi Frekuensi radio, sehingga *uplink* dan *downlink* menggunakan pita Frekuensi radio yang berbeda.
6. *3rd Generation Partnership Project* yang selanjutnya disingkat 3GPP adalah suatu kolaborasi internasional yang mengembangkan spesifikasi teknis untuk jaringan bergerak seluler generasi ketiga (3G) dengan berfokus kepada evolusi *Global System for Mobile communication (GSM)*.

7. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi radio yang selanjutnya disingkat BHP IPSFR adalah biaya yang dikenakan kepada pemegang izin pita spektrum Frekuensi radio.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini berada pada rentang frekuensi radio 1710-1785 MHz berpasangan dengan 1805-1880 MHz dengan moda FDD.
- (2) Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dengan cakupan wilayah layanan nasional.

Pasal 3

Penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz bertujuan meningkatkan pemanfaatan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz melalui realokasi penggunaan frekuensi radio untuk mendapatkan alokasi frekuensi radio yang berdampingan (*contiguous*) dalam satu Pita Frekuensi Radio sehingga mendukung pemenuhan sasaran pembangunan Rencana Pitalebar Indonesia.

BAB II

REALOKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz

Pasal 4

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz wajib melaksanakan realokasi penggunaan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz.
- (2) Realokasi penggunaan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Realokasi penggunaan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan Pita Frekuensi Radio secara bertahap di suatu wilayah layanan tertentu (*cluster*) oleh seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz.

- (4) Tahapan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Wilayah layanan tertentu (*cluster*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Tahapan dan mekanisme pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bagi masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 6

Realokasi penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan secara nasional sesuai jadwal yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz dalam menyelenggarakan jaringannya diberikan kebebasan untuk memilih teknologi sepanjang mengikuti spesifikasi 3GPP.
- (2) Pemberian kebebasan untuk memilih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada wilayah layanan tertentu (*cluster*) yang telah selesai melaksanakan realokasi penggunaan frekuensi radionya.

Pasal 8

Realokasi penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mengubah ketentuan masa laku izin penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pasal 9

Selama masa realokasi penggunaan frekuensi radio, masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz mempunyai hak menggunakan pita Frekuensi Radio yang telah ditentukan di wilayah layanan tertentu (*cluster*) sesuai tahapan dan jadwal realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 10

Penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik dalam rangka memenuhi jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL REALOKASI
PENGUNAAN FREKUENSI RADIO

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz wajib menunjuk Penanggung Jawab Operasional realokasi penggunaan frekuensi radio dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang diberikan kewenangan untuk menandatangani berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung Jawab Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. mengambil keputusan dan melakukan tindakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan Pita Frekuensi Radio pada wilayah layanan tertentu (*cluster*) sesuai jadwal realokasi.

Pasal 12

- (1) Penanggung Jawab Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kemajuan realokasi penggunaan frekuensi radio kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan kemajuan realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah selesainya realokasi pada wilayah layanan tertentu (*cluster*).

BAB IV
PENGATURAN BALIK (*FALLBACK*)

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil pengaturan ulang (*re-tuning*) penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak memenuhi batasan indikator kinerja, penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz dapat melakukan pengaturan balik (*fallback*) ke alokasi frekuensi radio sebelum dilakukannya pengaturan ulang (*re-tuning*) yang tidak berhasil.

- (2) Batasan indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi pengaturan balik (*fallback*) penggunaan Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menetapkan penyesuaian jadwal realokasi pada wilayah layanan tertentu (*cluster*) yang mengalami pengaturan balik (*fallback*).

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan realokasi penggunaan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan koordinasi diantara penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz berjalan dengan baik; dan
 - b. memastikan terpenuhinya jadwal realokasi sesuai tahapan yang ditetapkan.

Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:

- a. menetapkan sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif dan efisien;
- b. menerima dan mengevaluasi laporan tertulis yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- c. mengingatkan Penanggung Jawab Operasional dalam hal ditemukannya adanya potensi tidak terpenuhinya jadwal realokasi penggunaan frekuensi radio; dan
- d. menetapkan kebijakan khusus yang dapat menunjang pelaksanaan realokasi penggunaan frekuensi radio.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 16

- (1) Menteri dapat menetapkan kebijakan khusus apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peristiwa dan/atau keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta berada di luar kendali penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz, termasuk namun tidak terbatas pada banjir, gempa bumi, kebakaran, perang, huru-hara, kerusuhan sosial, pemberontakan, pemogokan massal, kegagalan teknis jaringan listrik provinsi atau *cluster*, embargo dan resesi ekonomi.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dengan melampirkan bukti yang sah dari instansi yang berwenang.
- (4) Selain keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, serta kebijakan lainnya dari Pemerintah baik pusat maupun daerah yang sangat mempengaruhi pelaksanaan penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz ini, Menteri dapat menetapkan kebijakan khusus.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Penggunaan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz hasil penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai BHP IPSFR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Seluruh biaya dan resiko yang timbul akibat realokasi penggunaan frekuensi radio pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz ditanggung oleh masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler pada Pita Frekuensi Radio 1800 MHz.

Pasal 19

Alokasi Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagai hasil dari penataan Pita Frekuensi Radio 1800 MHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 660

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Ptt. Kepala Biro Hukum,



Cecep Ahmed Feisal

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN PITA FREKUENSI 1800 MHz UNTUK
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
BERGERAK SELULER

REALOKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
PADA PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz

| No. | Semula | | Menjadi | | Wilayah Layanan |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | Frekuensi (MHz) | | Frekuensi (MHz) | | |
| | Uplink | Downlink | Uplink | Downlink | |
| 1 | 1710,0 - 1717,5 | 1805,0 - 1812,5 | 1710,0-1732,5 | 1805-1827,5 | Nasional |
| | 1730,0 - 1745,0 | 1825,0 - 1840,0 | | | |
| 2 | 1717,5 - 1722,5 | 1812,5 - 1817,5 | 1742,5-1762,5 | 1837,5-1857,5 | Nasional |
| | 1750,0 - 1765,0 | 1845,0 - 1860,0 | | | |
| 3 | 1722,5 - 1730,0 | 1817,5 - 1825,0 | 1762,5-1785 | 1857,5-1880 | Nasional |
| | 1745,0 - 1750,0 | 1840,0 - 1845,0 | | | |
| | 1765,0 - 1775,0 | 1860,0 - 1870,0 | | | |
| 4 | 1775,0 - 1785,0 | 1870,0 - 1880,0 | 1732,5-1742,5 | 1827,5-1837,5 | Nasional |

Keterangan:

1. *Uplink* adalah arah transmisi sinyal dari perangkat di sisi pelanggan (*Subscriber Station*) ke *Base Station*.
2. *Downlink* adalah arah transmisi sinyal dari *Base Station* ke perangkat di sisi pelanggan (*Subscriber Station*).

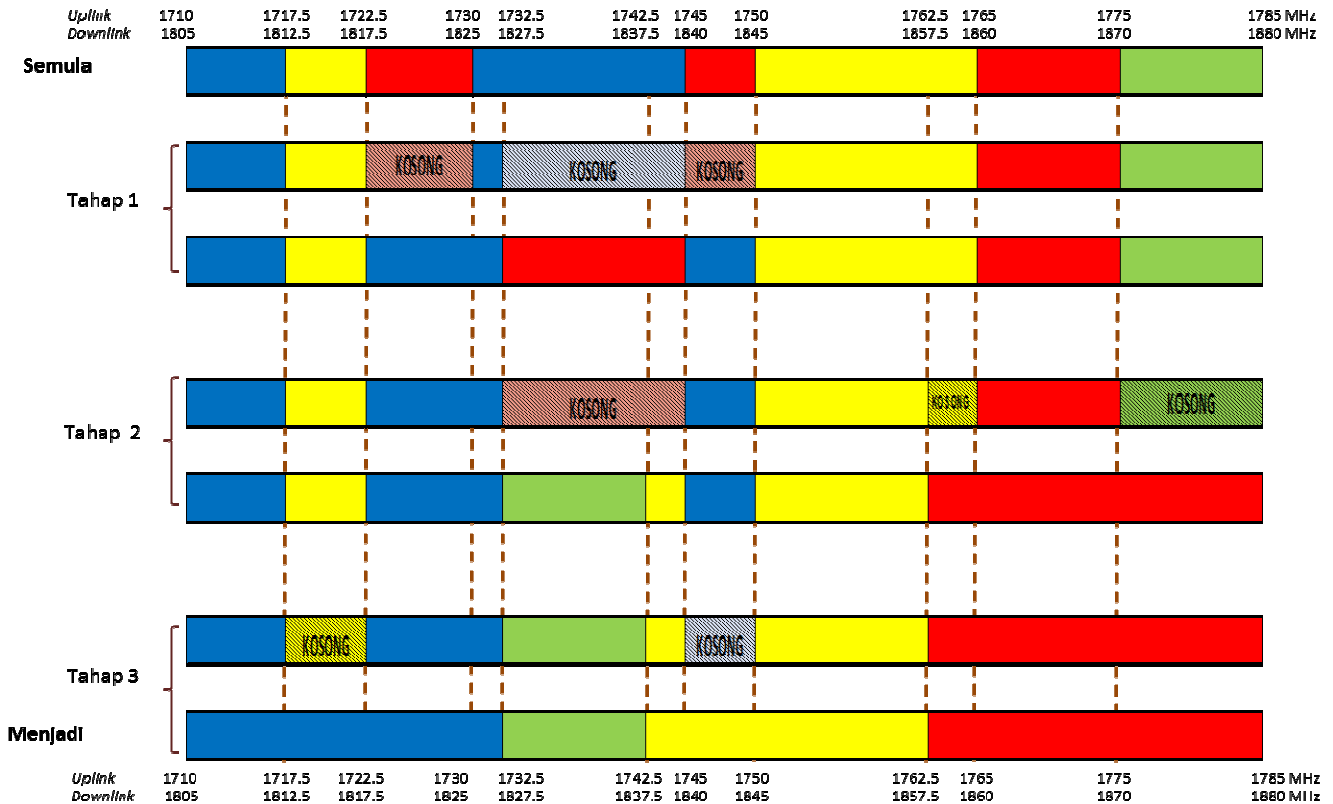
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN PITA FREKUENSI 1800 MHz UNTUK
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
BERGERAK SELULER

TAHAPAN REALOKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
PADA PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz



Keterangan:

Tahap 1

Tahap pertukaran (pengosongan dan pengisian) alokasi Pita Frekuensi Radio antara penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1722,5 MHz – 1730 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1817,5 MHz – 1825 MHz; dan
- rentang Pita Frekuensi Radio 1745 MHz – 1750 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1840 MHz – 1845 MHz;

dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1732.5 MHz – 1745 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1827,5 MHz – 1840 MHz.

Tahap 2

Tahap pertukaran (pengosongan dan pengisian) alokasi Pita Frekuensi Radio antara penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1732,5 MHz – 1745 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1827,5 MHz – 1840 MHz;

dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1762,5 MHz – 1765 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1857,5 MHz – 1880 MHz; dan

dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1775 MHz – 1785 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1870 MHz – 1880 MHz.

Tahap 3

Tahap pertukaran (pengosongan dan pengisian) alokasi Pita Frekuensi Radio antara penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1717,5 MHz – 1722,5 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1812,5 MHz – 1817,5 MHz;

dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler pada:

- rentang Pita Frekuensi Radio 1745 MHz – 1750 MHz berpasangan dengan rentang Pita Frekuensi Radio 1840 MHz – 1845 MHz.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENATAAN PITA FREKUENSI 1800 MHz UNTUK
 KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
 BERGERAK SELULER

WILAYAH LAYANAN TERTENTU (*CLUSTER*) PADA PENATAAN
 PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz

| NO. | CLUSTER | KABUPATEN/KOTA | |
|-----|--------------|-----------------------|-------------------|
| 1 | Papua | Merauke | Boven Digoel |
| | | Jayawijaya | Mappi |
| | | Kab. Jayapura | Asmat |
| | | Nabire | Supiori |
| | | Yapen | Mamberamo Raya |
| | | Biak Numfor | Mamberamo Tengah |
| | | Puncak Jaya | Yalimo |
| | | Paniai | Lanny Jaya |
| | | Mimika | Nduga |
| | | Sarmi | Puncak |
| | | Keerom | Dogiyai |
| | | Pegunungan Bintang | Intan Jaya |
| | | Yahukimo | Deiyai |
| | | Tolikara | Kota Jayapura |
| | | Waropen | |
| 2 | Papua Barat | Kab. Sorong | Kaimana |
| | | Manokwari | Tambrau |
| | | Fakfak | Maybrat |
| | | Sorong Selatan | Manokwari Selatan |
| | | Raja Ampat | Pegunungan Arfak |
| | | Teluk Bintuni | Kota Sorong |
| | | Teluk Wondama | |
| 3 | Maluku | Maluku Tengah | Kepulauan Aru |
| | | Maluku Tenggara | Maluku Barat Daya |
| | | Maluku Tenggara Barat | Buru Selatan |
| | | Buru | Ambon |
| | | Seram Bagian Timur | Tual |
| | | Seram Bagian Barat | |
| 4 | Maluku Utara | Halmahera Barat | Halmahera Timur |
| | | Halmahera Tengah | Pulau Morotai |
| | | Halmahera Utara | Pulau Taliabu |
| | | Halmahera Selatan | Ternate |
| | | Kepulauan Sula | Tidore Kepulauan |

| NO. | CLUSTER | KABUPATEN/KOTA | |
|-----|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 5 | Kalimantan Timur | Paser | Penajam Paser Utara |
| | | Kutai Kartanegara | Mahakam Ulu |
| | | Berau | Balikpapan |
| | | Kutai Barat | Samarinda |
| | | Kutai Timur | Bontang |
| | | | |
| 6 | Kalimantan Utara | Bulungan | Tana tidung |
| | | Malinau | Tarakan |
| | | Nunukan | |
| | | | |
| 7 | Kalimantan Selatan | Balangan | Kota Banjarmasin |
| | | Banjar | Kota Baru |
| | | Barito Kuala | Tabalong |
| | | Hulu Sungai Selatan | Tanah Bumbu |
| | | Hulu Sungai Tengah | Tanah Laut |
| | | Hulu Sungai Utara | Tapin |
| | | Kota Banjar Baru | |
| | | | |
| 8 | Kalimantan Tengah | Barito Selatan | Kotawaringin Barat |
| | | Barito Timur | Kotawaringin Timur |
| | | Barito Utara | Lamandau |
| | | Gunung Mas | Murung Raya |
| | | Kapuas | Pulang Pisau |
| | | Katingan | Seruyan |
| | | Kota Palangkaraya | Sukamara |
| | | | |
| 9 | Sulawesi Tenggara | Kolaka | Buton Utara |
| | | Konawe | Kolaka Timur |
| | | Muna | Konawe Kepulauan |
| | | Buton | Muna Barat |
| | | Konawe Selatan | Buton Tengah |
| | | Bombana | Buton Selatan |
| | | Wakatobi | Kendari |
| | | Kolaka Utara | Bau bau |
| | | Konawe Utara | |
| | | | |
| 10 | Sulawesi Selatan | Bantaeng | Luwu Utara |
| | | Barru | Maros |
| | | Bone | Pangkajene Dan Kepulauan |
| | | Bulukumba | Pinrang |
| | | Enrekang | Selayar |
| | | Gowa | Sidenreng Rappang |
| | | Jeneponto | Sinjai |
| | | Kota Makasar | Soppeng |
| | | Kota Palopo | Takalar |
| | | Kota Parepare | Tana Toraja |
| | | Luwu | Toraja Utara |
| | | Luwu Timur | Wajo |
| | | | |

| NO. | CLUSTER | KABUPATEN/KOTA | |
|------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 11 | Sulawesi Barat | Majene | Mamuju tengah |
| | | Mamasa | Mamuju Utara |
| | | Mamuju | Polewali Mandar |
| 12 | Aceh | Aceh Barat | Bireuen |
| | | Aceh Barat Daya | Gayo Lues |
| | | Aceh Besar | Kota Banda Aceh |
| | | Aceh Jaya | Kota Langsa |
| | | Aceh Selatan | Kota Lhokseumawe |
| | | Aceh Singkil | Kota Sabang |
| | | Aceh Tamiang | Nagan Raya |
| | | Aceh Tengah | Pidie |
| | | Aceh Tenggara | Pidie Jaya |
| | | Aceh Timur | Simeulue |
| | | Aceh Utara | Subulussalam |
| | | Bener Meriah | |
| 13 | Kepulauan Riau | Bintan | Kota Tanjung Pinang |
| | | Karimun | Lingga |
| | | Kepulauan Anambas | Natuna |
| | | Kota Batam | |
| 14 | Nusa Tenggara Barat | Bima | Lombok Tengah |
| | | Dompu | Lombok Timur |
| | | Kota Bima | Lombok Utara |
| | | Kota Mataram | Sumbawa |
| | | Lombok Barat | Sumbawa Barat |
| 15 | Nusa Tenggara Timur | Alor | Ngada |
| | | Belu | Rote Ndao |
| | | Ende | Sabu Raijua |
| | | Flores Timur | Sikka |
| | | Kota Kupang | Sumba Barat |
| | | Kupang | Sumba Barat Daya |
| | | Lembata | Sumba Tengah |
| | | Manggarai | Sumba Timur |
| | | Manggarai Barat | Timor Tengah Selatan |
| | | Manggarai Timur | Timor Tengah Utara |
| | | Nagekeo | Kab.Malaka |
| 16 | Riau | Bengkalis | Kota Pekanbaru |
| | | Indragiri Hilir | Kuantan Singingi |
| | | Indragiri Hulu | Pelalawan |
| | | Kampar | Rokan Hilir |
| | | Kepulauan Meranti | Rokan Hulu |
| | | Kota Dumai | Siak |

| NO. | CLUSTER | KABUPATEN/KOTA | |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------|
| 17 | Sumatera Barat | Agam | Lima Puluh Kota |
| | | Dharmasraya | Tanah Datar |
| | | Kepulauan Mentawai | Padang Pariaman |
| | | Kota Bukit Tinggi | Pasaman |
| | | Kota Padang | Pasaman Barat |
| | | Kota Padang Panjang | Pesisir Selatan |
| | | Kota Pariaman | Sijunjung |
| | | Kota Payakumbuh | Kab. Solok |
| | | Kota Sawah Lunto | Solok Selatan |
| | | Kota Solok | |
| 18 | Sumatera Utara 1 | Deli Serdang | Kota Tebing Tinggi |
| | | Kota Binjai | Serdang Bedagai |
| | | Kota Medan | |
| 19 | Sumatera Utara 2 | Asahan | Mandailing Natal |
| | | Batu Bara | Nias |
| | | Dairi | Nias Barat |
| | | Humbang Hasundutan | Nias Selatan |
| | | Karo | Nias Utara |
| | | Kota Gunung Sitoli | Padang Lawas |
| | | Kota Padangsisimpuan | Padang Lawas Utara |
| | | Kota Pematangsiantar | Pakpak Bharat |
| | | Kota Sibolga | Samosir |
| | | Kota Tanjung Balai | Simalungun |
| | | Labuhan Batu | Tapanuli Selatan |
| | | Labuhan Batu Selatan | Tapanuli Tengah |
| | | Labuhan Batu Utara | Tapanuli Utara |
| | | Langkat | Toba Samosir |
| 20 | Lampung | Kota Bandar Lampung | Pesisir Barat |
| | | Kota Metro | Mesuji |
| | | Lampung Barat | Pesawaran |
| | | Lampung Selatan | Pringsewu |
| | | Lampung Tengah | Tanggamus |
| | | Lampung Timur | Tulang Bawang Barat |
| | | Lampung Utara | Tulangbawang |
| | | Way Kanan | |
| 21 | Kep. Bangka Belitung | Bangka | Belitung |
| | | Bangka Barat | Belitung Timur |
| | | Bangka Selatan | Kota Pangkal Pinang |
| | | Bangka Tengah | |
| 22 | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Kota Bengkulu |
| | | Bengkulu Tengah | Lebong |
| | | Bengkulu Utara | Mukomuko |
| | | Kaur | Rejang Lebong |
| | | Kepahiang | Seluma |

| NO. | CLUSTER | KABUPATEN/KOTA | |
|-----|------------------|---------------------------|----------------------------|
| 23 | Jambi | Batang Hari | Muaro Jambi |
| | | Bungo | Sarolangun |
| | | Kerinci | Tanjung Jabung Barat |
| | | Kota Jambi | Tanjung Jabung Timur |
| | | Kota Sungai Penuh | Tebo |
| | | Merangin | |
| 24 | Sumatera Selatan | Banyu Asin | Musi Rawas |
| | | Empat Lawang | Musi Rawas Utara |
| | | Kota Lubuk Linggau | Ogan Ilir |
| | | Kota Pagar Alam | Ogan Komering Ilir |
| | | Kota Palembang | Ogan Komering Ulu |
| | | Kota Prabumulih | Ogan Komering Ulu Selatan |
| | | Lahat | Ogan Komering Ulu Timur |
| | | Muara Enim | Penukal Abab Lematang Ilir |
| | | Musi Banyuasin | |
| 25 | Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow | Kota Manado |
| | | Bolaang Mongondow Selatan | Kota Tomohon |
| | | Bolaang Mongondow Timur | Minahasa |
| | | Bolaang Mongondow Utara | Minahasa Selatan |
| | | Kepulauan Sangihe | Minahasa Tenggara |
| | | Kepulauan Talaud | Minahasa Utara |
| | | Kota Bitung | Siau Tagulandang Biaro |
| | | Kota Kotamobagu | |
| 26 | Gorontalo | Boalemo | Gorontalo Utara |
| | | Bone Bolango | Kota Gorontalo |
| | | Kab. Gorontalo | Pohuwato |
| 27 | Sulawesi Tengah | Banggai | Morowali Utara |
| | | Banggai Kepulauan | Parigi Moutong |
| | | Banggai Laut | Poso |
| | | Buol | Sigi |
| | | Donggala | Tojo Una-Una |
| | | Kota Palu | Toli-Toli |
| | | Morowali | |
| 28 | Bali | Badung | Jembrana |
| | | Bangli | Karang Asem |
| | | Buleleng | Klungkung |
| | | Denpasar | Tabanan |
| | | Gianyar | |

| NO. | CLUSTER | KABUPATEN/KOTA | |
|------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 29 | Jawa Timur 1 | Bangkalan | Pasuruan |
| | | Bojonegoro | Sampang |
| | | Gresik | Sidoarjo |
| | | Kota Pasuruan | Sumenep |
| | | Kota Surabaya | Tuban |
| | | Lamongan | Pamekasan |
| 30 | Jawa Timur 2 | Banyuwangi | Kota Probolinggo |
| | | Bondowoso | Lumajang |
| | | Jember | Malang |
| | | Kota Batu | Probolinggo |
| | | Kota Malang | Situbondo |
| 31 | Jawa Timur 3 | Jombang | Nganjuk |
| | | Kediri | Ngawi |
| | | Kota Blitar | Pacitan |
| | | Kota Kediri | Ponorogo |
| | | Kota Madiun | Trenggalek |
| | | Kota Mojokerto | Blitar |
| | | Madiun | Tulungagung |
| | | Magetan | |
| 32 | Jawa Tengah 1 | Banjarnegara | Kota Tegal |
| | | Banyumas | Pekalongan |
| | | Batang | Pemalang |
| | | Brebes | Purbalingga |
| | | Cilacap | Tegal |
| | | Kebumen | Wonosobo |
| | | Kota Pekalongan | |
| 33 | Jawa Tengah 2 | Blora | Kota Semarang |
| | | Demak | Kudus |
| | | Grobogan | Pati |
| | | Jepara | Rembang |
| | | Kendal | Semarang |
| | | Kota Salatiga | Temanggung |
| 34 | Jawa Tengah 3 | Bantul | Kota Magelang |
| | | Gunung Kidul | Kota Surakarta |
| | | Kota Yogyakarta | Magelang |
| | | Kulon Progo | Purworejo |
| | | Sleman | Sragen |
| | | Boyolali | Sukoharjo |
| | | Karanganyar | Wonogiri |
| Klaten | | | |

| NO. | CLUSTER | KABUPATEN/KOTA | |
|------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 35 | Jawa Barat 1 | Bandung | Kota Cimahi |
| | | Bandung Barat | Subang |
| | | Cianjur | Sumedang |
| | | Kota Bandung | |
| 36 | Jawa Barat 2 | Ciamis | Kota Cirebon |
| | | Cirebon | Kota Tasikmalaya |
| | | Garut | Kuningan |
| | | Indramayu | Majalengka |
| | | Kota Banjar | Tasikmalaya |
| 37 | Purwakarta | Purwakarta | |
| 38 | Kalimantan Barat | Bengkayang | Landak |
| | | Kapuas Hulu | Melawi |
| | | Kayong Utara | Pontianak |
| | | Ketapang | Sambas |
| | | Kota Pontianak | Sanggau |
| | | Kota Singkawang | Sekadau |
| | | Kubu Raya | Sintang |
| | | Mempawah | |
| 39 | Sukabumi | Kota Sukabumi | Sukabumi |
| 40 | Banten | Kota Cilegon | Lebak |
| | | Kota Serang | Pandeglang |
| | | | Serang |
| 41 | Jakarta 1 | Kab Adm Kep Seribu | Kota Jakarta Selatan |
| | | Kota Jakarta Barat | Kota Jakarta Timur |
| | | Kota Jakarta Pusat | Kota Jakarta Utara |
| | | Tangerang Selatan | Tangerang |
| | | Kota Bekasi | Kota Tangerang |
| 42 | Jakarta 2 | Kab. Bekasi | Kota Depok |
| | | Kab. Bogor | Kota Bogor |
| | | Karawang | |

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Keterangan Tabel



: Hari Sabtu dan Minggu



: Hari libur nasional



Tahapan pelaksanaan realokasi penggunaan penataan pita Frekuensi radio 1800
: MHz



: Tidak ada kegiatan realokasi (*freeze period*)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RUDIANTARA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENATAAN PITA FREKUENSI 1800 MHz UNTUK
 KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
 BERGERAK SELULER

FORMAT LAPORAN KEMAJUAN REALOKASI PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO
 PADA PITA FREKUENSI RADIO 1800 MHz

| | | | |
|--|----------|--|---------------------|
| PENYELENGGARA BERGERAK SELULER PT. | JARINGAN | NAMA OPERASIONAL: | PENANGGUNG JAWAB |
| TANGGAL: | | CLUSTER : | |
| | | JADWAL CLUSTER: TGL S/D | |

TAHAP 1 :
PT 1 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 1); DAN
PT 2 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 2);
 TANGGAL: S/D

PELAKSANAAN *RETUNING*:

BERHASIL, TANGGAL:

DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR):

JUMLAH KEGAGALAN (JIKA ADA):

TANGGAL KEGAGALAN *RETUNING*: (1), (2), (3)

DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR):

TAHAP 2 :
PT 1 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 1),
PT 2 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 2); DAN
PT 3 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 3);
 TANGGAL: S/D

PELAKSANAAN *RETUNING*:

BERHASIL, TANGGAL:

DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR):

JUMLAH KEGAGALAN (JIKA ADA):

TANGGAL KEGAGALAN *RETUNING*: (1), (2), (3)

DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR):

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> TAHAP 3 : PT 1 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 1); DAN PT 2 (PENYELENGGARA JARINGAN BERGERAK SELULER 2) TANGGAL: S/D |
| PELAKSANAAN <i>RETUNING</i> : <input type="checkbox"/> BERHASIL , TANGGAL: DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR): <input type="checkbox"/> JUMLAH KEGAGALAN (JIKA ADA): TANGGAL KEGAGALAN <i>RETUNING</i> : (1), (2), (3) DENGAN RINCIAN INFORMASI PELAKSANAAN (TERLAMPIR): |

| |
|------------------------------|
| RINGKASAN PELAKSANAAN |
| 1. 2. 3. 4. |

JAKARTA, 2015
PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL
PT.

tertanda

(nama jelas)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN PITA FREKUENSI 1800 MHz UNTUK
KEPERLUAN PENYELENGGARAAN JARINGAN
BERGERAK SELULER

BATASAN INDIKATOR KINERJA

- A. BATASAN INDIKATOR KINERJA PADA SAAT MELAKUKAN PENGATURAN ULANG (*RE-TUNING*) (H)
1. 95 % dari jumlah total *Base Station* di *cluster* Jakarta 1, *cluster* Jakarta 2, *cluster* Banten, *cluster* Sumatera Utara 2, *cluster* Sulawesi Selatan, atau *cluster* Riau berhasil dilakukan *re-tuning*;
 2. 90 % dari jumlah total *Base Station* pada *cluster* lainnya berhasil dilakukan *re-tuning*.
- B. BATASAN INDIKATOR KINERJA JARINGAN SAMPAI DENGAN PUKUL 18:00 SETELAH DILAKUKANNYA PENGATURAN ULANG (*RE-TUNING*) (H+1)
1. Penurunan kinerja jaringan kurang dari 50 % dari standar indikator kinerja jaringan (*baseline*) pada saat tidak dilakukan pengaturan (*retuning*) di *cluster* Jakarta 1, *cluster* Jakarta 2, *cluster* Banten, *cluster* Sumatera Utara 2, *cluster* Sulawesi Selatan, atau *cluster* Riau;
 2. Penurunan kinerja jaringan kurang dari 100 % dari standar indikator kinerja jaringan (*baseline*) pada saat tidak dilakukan pengaturan (*re-tuning*) *cluster* lainnya.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA